

BAB III

DINAMIKA HUBUNGAN SWEDIA-ARAB SAUDI SEBELUM TAHUN

2016

Fokus dalam bab ini sendiri akan membahas mengenai hubungan Swedia dengan Arab Saudi dan juga dinamika hubungan Swedia – Arab Saudi sebelum tahun 2016. Dalam bab ini akan terbagi dalam 3 sub-bab yaitu, sejarah singkat hubungan Swedia – Arab Saudi, isu-isu hubungan Swedia dengan Arab Saudi dan kesimpulan.

A. Sejarah Singkat Hubungan Swedia – Arab Saudi

Swedia dan Arab Saudi memiliki hubungan yang sangat baik dan hubungan diplomatik ini sudah terjalin cukup lama. Hubungan diplomatik antara Swedia dengan Arab Saudi sudah didirikan sejak tahun 1957. Sejak 1984 ada kedutaan besar Swedia di Riyadh dan Konsulat Kehormatan di Jeddah. Arab Saudi juga memiliki kedutaan besar di Stockholm (Saudi Arabia, 2016). Selama bertahun-tahun, banyak kunjungan tingkat tinggi telah terjadi. Antara lain, sekretaris negara Oscar Stenstrom memimpin delegasi bisnis ke Arab Saudi pada Oktober 2015, dan pada bulan yang sama, Menteri Industri dan inovasi Mikael Damberg mengunjungi negara itu. (Sweden Tries To Limit Damage With Saudis, 2015)

Arab Saudi telah lama menjadi salah satu mitra dagang yang sangat penting bagi Swedia di Timur Tengah. Ekspor Swedia ke negara Arab Saudi pada tahun 2014 sendiri mencapai lebih dari SEK 11 miliar. Selama periode yang sama, nilai impor Swedia dari Arab Saudi sekitar SEK 936 juta. Bisnis Swedia terwakili

dengan baik di pasar Saudi, dengan sekitar 40 perusahaan Swedia didirikan di Arab Saudi dan lebih dari seratus perusahaan diwakili oleh mitra lokal. Pada tahun 2014 juga beberapa perusahaan manufaktur dan konsumen telah mendirikan operasi di Arab Saudi, termasuk IKEA dan H & M. Selain manufaktur dan perdagangan konsumen, perusahaan Swedia telah berpartisipasi dalam proyek infrastruktur yang luas di negara ini. Kerjasama ekonomi juga ditandai dengan ekspor jasa yang luas dari badan pemerintah Swedia, insinyur, dokter, dokter gigi dan profesional perawatan kesehatan lainnya. Dari perbatasan Saudi, investasi di perusahaan Swedia dan di pasar real estat Swedia berkontribusi pada kerja sama ekonomi dan komersial. Hubungan dalam pendidikan dan penelitian juga telah berevolusi. Beberapa universitas dan perguruan tinggi Swedia telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan mitra Saudi. Sejumlah perguruan tinggi Swedia telah diakreditasi untuk program beasiswa Raja Abdullah.

Pada tanggal 14 November 2005 delegasi pertahanan Saudi dan pemerintah Swedia menyepakati kerjasama militer. Wakil menteri pertahanan Arab Saudi mengunjungi Swedia untuk melakukan perjanjian bisnis dan investasi dalam sistem pengawasan dan sistem senjata Erieye yang menjadi bagian dari rencana untuk kontak yang lebih intim antar negara. Kedua pihak menekankan di media bahwa kerjasama mencakup beberapa bidang kebijakan. Kerangka perjanjian kerja ini dapat menjadi preseden bagi kerjasama pertahanan dengan berbagai negara-negara diktator yang sebenarnya dapat mengancam kebijakan luar negeri Swedia yang bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan kesadaran mengenai hak asasi manusia. (Jonsson, 2016)

Wakil menteri pertahanan Saudi, Pangeran Khaled menjelaskan pandangannya tentang apa arti perjanjian itu. Pangeran Khaled menjelaskan bahwa ini bukan hanya tentang membeli senjata. Ini tentang kemitraan lengkap di mana Arab Saudi dan Swedia dapat saling bertukar pengetahuan tentang pelatihan militer dan pendidikan lebih lanjut di daerah-daerah tertentu. Ini juga tentang beberapa jenis penelitian, pertukaran intelijen dan kerjasama (Ohlsson, 2006). Menurut laporan Kementerian Luar Negeri Swedia sendiri tentang hak asasi manusia dan demokrasi di Arab Saudi, situasinya sangatlah serius. Arab Saudi tidak memiliki pemilihan demokratis dan tidak ada kebebasan beragama. Perempuan ditolak dalam hak asasi manusia. Homoseksualitas dilarang oleh hukum dan larangan adanya partai-partai politik, demonstrasi menjadi hal yang ilegal, penyiksaan fisik seperti amputasi dan hukuman cambuk biasa terjadi, hukuman mati juga masih dilakukan dengan menggunakan hukuman gantung, kritikan terhadap Islam dan keluarga Raja juga dilarang keras di Arab Saudi. orang-orang yang melanggar hukum syariah Islam akan mendapatkan hukuman cambuk oleh pemerintah. (Lubaya, 2018)

Organisasi independen Amerika, Freedom House, setiap tahunnya secara rutin akan memeringkat tingkat hak asasi manusia di negara-negara dunia. Menurut mereka, situasi hak asai manusia di Arab Saudi belum membaik secara signifikan selama sepuluh tahun terakhir. Negara ini berada dalam kategori yang sama dengan negara-negara fundamentalis komunis dan religius seperti Kuba, Korea Utara, Iran dan Laos. (Freedom in the World 2018: Saudi Arabia, 2018)

Kerjasama militer yang dilakukan oleh Swedia dengan Arab Saudi ini juga menimbulkan banyak pertanyaan. Hukum yang ada di Swedia mengenai penjualan

senjata sebenarnya bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Swedia dengan melakukan kerjasama militer dengan Arab Saudi (Apel, 2015). dalam hukum yang ada, ekspor senjata hanya boleh dilakukan jika ada alasan keamanan atau pertahanan untuk melakukan ekspor senjata dan ekspor senjata ini tidak melanggar kebijakan luar negeri Swedia. Sedangkan dalam kebijakan luar negeri Swedia yang dirumuskan oleh pemerintah, Swedia dalam kebijakan luar negerinya mementingkan untuk mempromosikan hak asasi manusia (Gender equality policy in Sweden, 2016). Menteri luar negeri Swedia mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Swedia harus mempromosikan dan meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia adalah prioritas dalam kebijakan luar negeri Swedia dan prioritas ini akan mempengaruhi dan meresap pada semua bagian-bagiannya termasuk dalam kerjasama pembangunan, kebijakan migrasi, kebijakan keamanan dan kebijakan perdagangan (Saudi Arabia, 2016).

B. Isu-Isu Hubungan Swedia-Arab Saudi

1. Perjanjian Militer Swedia dengan Arab Saudi Tahun 2005

Pada awal tahun 2000, Arab Saudi memiliki anggaran pengeluaran dalam bidang militer sebesar 10% dari total anggaran negara dan pengeluaran ini masih tanpa Arab Saudi memiliki industri pertahanannya sendiri. Hal ini menjadikan Arab Saudi menjadi salah satu negara pengimport senjata terbesar di dunia. Untuk memangkas biaya dan mengurangi ketergantungannya pada Amerika, Arab Saudi berusaha untuk mengembangkan industri militernya sendiri. (Ronnestig, 2014)

Di Swedia, pemerintah SAP dan SAAB-Ericsson sedang mencari pembeli ataupun pasar agar dapat membiayai teknologi sistem radar Erieye mereka yang

baru dikembangkan. Setelah Swedia menjalani periode negosiasi yang intens yang berjalan kurang lebih selama 5 tahun dengan Arab Saudi, Swedia menyadari bahwa pengembangan teknologi ini akan menjadi batu loncatan Swedia untuk mengembangkan sesuatu yang lebih besar lagi dan akan mendapatkan pasar yang lebih besar. Swedia akan mendapatkan pemasukan yang stabil dan juga konsultan keuangan. Sebagai imbalannya, Arab Saudi akan mengembangkan industri militernya sendiri. (Apel, 2015)

Setelah negosiasi dilakukan selama bertahun-tahun, akhirnya Swedia dan Arab Saudi menandatangani MoU perjanjian militer ini pada tahun 2005. Karena perjanjian telah dinegosiasikan dan disepakati bersama, kerjasama ini akan dipegang oleh Menteri Pertahanan Leni Bjorklund (SAP) untuk membawa perjanjian tersebut kepada pemerintah SAP. (Apel, 2015)

Ketika mengumumkan perjanjian ini kepada pers, Menteri Pertahanan Bjorklund berbicara tentang peran Swedia dalam hubungannya dengan dunia, khususnya Arab Saudi.

“That country has a central position within the Muslim world. In Saudi Arabia is Mecca and Medina. We as a part of the Western world needs to an exchange with the Islamic world. If you have an exchange, there is opportunity to discuss those issues where we do not have agree. It is not like we are changing our view about human rights” (Eriksson, 2015)

Swedia adalah bagian dari dunia Barat, Menteri Pertahanan Bjorklund berpendapat bahwa sangatlah wajar dan perlu jika Swedia memiliki hubungan

dengan negara-negara penting di dunia Muslim seperti Arab Saudi. tentu ada perbedaan, tapi itu baik-baik saja. Sama seperti Swedia dalam mempertahankan tradisinya tentang hak asasi manusia, begitu juga dengan Arab Saudi. tetapi bukan hak Swedia untuk memberi tahu dunia Islam tentang tradisi hukum dan hak konstitusional yang harus diikuti. Hal ini tampak berada di luar kemampuan dan juga kebijakan luar negeri Swedia. (Ohlsson, 2006)

Menteri Luar Negeri Laila Freivalds berada di tempat yang sama ketika membela perjanjian di parlemen.

“Saudi Arabia is our most important export market in the Arab world. [...] The government is hoping for increased Saudi investments. [...] Cooperation and open channels offer the possibility to exchange views and experiences, [...] to least regarding the respect for human rights.” (Ohlsson, 2006)

Menteri Luar negeri Laila Freivalds mengisyaratkan bahwa Swedia hanyalah negara kecil yang akan sangat beresiko untuk menanggung akibatnya jika mengganggu kekuatan besar regional seperti Arab Saudi. kesejahteraan Swedia bergantung pada pekerjaan dan pertumbuhan yang pada gilirannya akan bergantung pada ekspor yang tidak dapat dipertaruhkan.

Pandangan ini kontras dengan SAP oleh *The Association of Christian Social Democrats* (ACSD) menerbitkan pernyataan pers yang memprotes perjanjian tersebut.

“Swedish arms exports must comply with the cornerstones of Swedish foreign policy, i.e. the promotion of peace, democracy, human rights and sustainable development.” (Oden & Wohlgemuth, 2009)

Sebagaimana dijelaskan di atas, baik Menteri Pertahanan Bjorklund dan juga Menteri Luar Negeri Laila Freivalds menekankan kebutuhan Swedia akan ekspor sebagai negara kecil yang secara implisit membatasi pada kritik Swedia terhadap negara lain. Di dalam parlemen, Menteri Luar Negeri Laila Freivalds melanjutkan dengan berbicara tentang prioritas kepentingan kebijakan luar negeri Swedia.

“I read this interpellation as about the balancing between different goals in Swedish foreign policy. [...] Trade and investment promotion is part of the government’s program for more jobs and sustainable growth. The trade policy interests is one part of many parts of the foreign policy. Development, migration and security are other central elements of Swedish foreign policy. So is also, [...] the effort to promote the respect of human rights. The protection of human rights is a priority within Swedish foreign policy that must affect and permeate all its parts. [...] Saudi Arabia is an economic, religious and political great power with significant influence in the region. [...] Altogether Saudi Arabia is a country with which cooperation and exchange on all levels within different areas gain Swedish foreign policy interests in a wide sense.” (Freivalds, 2006)

Hak asasi manusia hanyalah salah satu bagian di antara banyaknya kebijakan luar negeri Swedia. Kepentingan lain seperti perdagangan, pembangunan dan keamanan juga harus diperhitungkan. Dan sementara hak asasi manusia adalah prioritas yang sedang dipertimbangkan dalam kasus perjanjian dengan Arab Saudi karena masih banyak faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan. (Apel, 2015)

Sekali lagi, pandangan ini hanya berlawanan dengan SAP oleh *The Association of Christian Social Democrats (ACSD)* (juga dikenal sebagai “*The Brotherhood movement*”)

“Industrial policy reasons should never be the basis for licensing [of arms exports]. Swedish arms exports to Saudi Arabia should these reasons firmly rejected” (Oden & Wohlgemuth, 2009)

Pada konferensi persnya, Menteri Pertahanan Bjorklund menjelaskan sikap Swedia mengenai perjanjian dengan Arab Saudi dan hak asasi manusia.

“By having an exchange, we also have respect for each other, so that we also can win respect for each other’s views.” (Where is the consequence?, 2005)

Dan di dalam parlemen, Menteri Luar Negeri Laila Freivalds memaparkan tentang sarana untuk mempengaruhi negara-negara lain.

“Mr. Speaker! How we should relate to the countries that are dictatorships and countries where human rights are violated every day is a recurring issue that we have to take a position. Sometimes it leads us to conclude that it is best to isolate the country as much as possible, cut off all relations and

not to have any contacts with the country concerned. During decades of trying by different types of policies we have come to the realization that isolation seldom leads to a positive development in a dictatorship, and in a country where human rights are violated. On the contrary, [it is] by continuing to maintain relations, develop relationships, [...] that changes may eventually happen.” (Freivalds, 2006)

Perjanjian dengan Arab Saudi ini tidak hanya mengarah pada meningkatnya pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi negara, Menteri Luar Negeri Laila Freivalds berpendapat bahwa perjanjian ini juga baik untuk hak asasi manusia, salah satu caranya adalah dengan melakukan interaksi dengan cara membuat perjanjian dengan Arab Saudi. Secara bertahap perubahan demokratis yang nyata akan dapat tercapai. Alternatifnya, jika memang perubahan demokratis tidak tercapai, maka kita dapat memutuskan semua hubungan dengan Arab Saudi dan mengisolasi negara tersebut. Menteri Luar Negeri Laila Freivalds tidak membedakan antara kerjasama militer dan ekspor senjata dengan perjanjian perdagangan secara umum. Perdagangan adalah perdagangan. Hal inilah yang dikritisi oleh *Association of Christian Social Democrats (ACSD)*. (Apel, 2015)

“The Brotherhood Movement welcomes the government for political dialogue even with dictatorships, because isolation and boycott, only in exceptional cases is effective foreign policy means. [...] However, we found it hard to see how a deepened military cooperation and an extensive arms trade to Saudi Arabia in any way could be positive for the development of events in the Middle East nor the forces that courageously and steadfastly

working for democracy in the Arab world.” (Where is the consequence?, 2005)

Titik penyelesaian Menteri Luar Negeri Laila Freivalds di dalam parlemen adalah bahwa Swedia sudah mengkritik Arab Saudi melalui Uni Eropa, metode yang jauh lebih baik dalam pandangannya.

” With the worrying situation for human rights in mind, Saudi Arabia is important in our and the EU’s engagement in human rights and democracy. [...] Sweden is on the forefront of addressing the lack of respect for human rights in Saudi Arabia, both bilaterally, through the EU and UN context. The EU has on several occasions publicly expressed its condemnation of the use of the death penalty, torture and restrictions on freedom of expression in Saudi Arabia. The same applies to our concern for the status of women. With Swedish support, there is currently a debate within the EU on how to more systematically examine and call to attention both deficiencies and progress on human rights in the Arabian Peninsula.” (Freivalds, 2006)

Secara keseluruhan, Menteri Luar Negeri Laila Freivalds dan Menteri Pertahanan Bjorklund berpendapat bahwa alih-alih bertindak sendiri dan di tempat terbuka, lebih bijaksana untuk bertindak bersama dengan orang lain dan melakukan di belakang panggung. Perubahan nyata akan datang dari “pembicaraan yang penuh hormat”. Pandangan ini lebih lanjut dikonfirmasi sebagai posisi resmi pemerintah SAP di komite konstitusi.

“It is the view of the administration that cooperation gives unique opportunities to talk about development in different aspects of society. Good and confident relations create better settings for submitting rightful criticism, for example in the area of human rights.” (Committee on Constitutional Affairs 2005/06: KU20, 2006)

Walaupun banyak pro dan kontra yang terjadi dalam politik domestik Swedia, tetapi kerjasama antara Swedia dan Arab Saudi dalam industri senjata militer ini tetaplah berjalan. Nota kesepahaman kerjasama Militer Swedia – Arab Saudi pun dibuat dan ditanda tangani pada tahun 2005 seperti berikut (Sveriges internationella överenskommelser, 2005):

Mengakui dengan sangat puas keinginan untuk memperkuat hubungan persahabatan yang baik melalui kerjasama militer langsung sesuai dengan kebijakan nasional dan internasional dari negara masing-masing dan dengan cara konsisten dengan hukum nasional yang diterapkan di masing-masing negara dan tidak bertentangan dengan komitmen mereka di bidang internasional.

Memperhatikan bahwa kerjasama kedua negara mempromosikan perdamaian dan stabilitas internal dan tidak ditujukan kepada pihak ketiga. Untuk tujuan monev ini, kedua pemerintah yang selanjutnya disebut secara bersama sebagai “pihak” dan secara individu sebagai “pihak” dengan ini telah menyetujui hal-hal berikut:

Artikel 1

Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk mengidentifikasi dan memperluas bidang-bidang utama kerjasama militer antara kedua pihak yang berkaitan dengan sistem dan produk militer, logistik, pelatihan, transfer teknologi, penelitian dan pengembangan disamping pertukaran keahlian dalam bidang perbaikan dan layanan medis militer.

Artikel 2

Kedua belah pihak setuju bahwa kerjasama militer antara kedua negara akan berada di bidang-bidang berikut:

1. Produk militer dan logistik
 - a. Peralatan dan sistem komando, kontrol dan komunikasi
 - b. Peralatan dan sistem peperangan elektronik dan jaringan intelijen
 - c. Peralatan pelindung dan dekontaminasi dari senjata pemusnah massal
 - d. Peralatan pemindaian keamanan
 - e. Dukungan teknis untuk peralatan dan sistem
2. Pelatihan
 - a. Setiap pihak harus memungkinkan pihak lain untuk bergabung dengan pelatihan militer daknis yang dilakukan oleh masing-masing pihak di negara mereka sendiri
 - b. Kedua belah pihak sepakat untuk mempelajari dan menginvestigasi kemungkinan-kemungkinan kerjasama dalam bidang pelatihan taktis dan teknis termasuk bidang sistem peperangan elektronik dan jaringan intelijen

3. Penelitian dan pengembangan

- a. Kedua belah pihak sepakat untuk mempelajari dan menyelidiki kemungkinan untuk membentuk program kemitraan antara badan penelitian pertahanan Swedia dan lembaga terkait di Kerajaan Arab Saudi di bidang teknologi pertahanan
- b. Kedua belah pihak akan melakukan upaya ekstra untuk bertukar keahlian teknis dan teknik untuk pemeliharaan, pengembangan dan pembangunan kembali sistem senjata, peralatan dan suku cadang

4. Transfer teknologi militer

- a. Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan informasi dan teknologi manufaktur yang diperlukan untuk melakukan semua tingkat kegiatan pemeliharaan pada produk militer yang mereka perdagangkan
- b. Setiap pihak harus mendorong sektor industri di negaranya untuk membangun proyek bersama untuk merakit atau memproduksi produk militer di negara pihak lain
- c. Pertukaran keahlian dan informasi di bidang teknologi militer

5. Layanan medis militer

Kerjasama di bidang layanan medis ini termasuk dalam pertukaran pelatihan dokter, asisten teknis dan rekan kerja di bidang layanan medis militer tambahan dan bidang kedokteran sesuai dengan persyaratan masing-masing pihak dan untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan pengetahuan dan pertukaran informasi di bidang kesehatan militer yang digunakan oleh negara.

Artikel 3

1. Komite harus dibentuk dengan nama (Komite Militer Bersama) yang bertanggung jawab untuk tindak lanjut dan pengembangan kerjasama militer antara kedua negara dan jika ada hambatan yang mungkin timbul terkait MoU ini dan masing-masing pihak akan menunjuk wakilnya di lain waktu; komite akan bertemu setiap tahun di masing-masing negara. Komite tersebut meningkatkan rekomendasinya kepada otoritas yang lebih tinggi di kedua negara untuk mendapatkan persetujuan.
2. Panitia dapat membentuk satuan tugas khusus dari masing-masing pihak untuk dapat melayani kerjasama dalam bidang militer
3. Komite memiliki hak untuk mencari bantuan dari para ahli di kedua negara yang dianggap perlu untuk bidang kerjasama militer.

Artikel 4

1. Masing-masing pihak menjamin pertukaran yang aman (bahan-bahan klasifikasi, draft proyek, spesifikasi teknis dan informasi klasifikasi lainnya yang dipertukarkan di antara mereka menurut memorandum ini) sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara dan kedua belah pihak harus menyediakan bahan-bahan klasifikasi tersebut dan informasi tingkat perlindungan yang sama yang disediakan untuk bahan-bahan dan informasi yang diklasifikasikannya.
2. Tingkat klasifikasi dokumen harus sesuai dengan tabel berikut:

Kingdom of Saudi Arabia	
Top Secret	
Secret	
Confidential	
Kingdom of Sweden	
Top Secret	Kvalifi cerat hemlig
Secret	Hemlig
Confidential	Hemlig

3. Pihak penerima tidak boleh memberikan informasi yang diklasifikasikan kepada pemerintah, organisasi nasional, atau entitas pihak ketiga lainnya tanpa konsultasi sebelumnya dari pihak yang berasal

Artikel 5

MoU ini tidak membebankan tanggung jawab keuangan pada salah satu pihak kecuali bahwa masing-masing pihak akan bertanggung jawab atas biaya administrasi sendiri yang terkait dengan dukungan dari MoU ini.

Artikel 6

1. MoU ini dibuat dalam bahasa Arab, Inggris dan Swedia, semua naskah sama otentiknya. jika terjadi adanya perselisihan tentang penafsiran maka teks bahasa Inggris yang akan digunakan
2. Setiap perselisihan mengenai interpretasi atau implementasi dari MoU ini akan diselesaikan hanya dengan konsultasi antara para pihak dan tidak akan

dirujuk ke pengadilan nasional atau internasional atau pihak ketiga lainnya untuk penyelesaian

Artikel 7

1. MoU ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan terakhirnya.
2. MoU ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan akan secara otomatis diperbarui untuk periode lima tahun berturut-turut kecuali jika diakhiri oleh salah satu pihak yang memberikan pemberitahuan tertulis enam bulan sebelum berakhirnya MoU
3. Pengakhiran MoU ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian program kerjasama yang telah dilakukan sebelum pengakhiran MoU ini
4. Para pihak dapat memasuki perjanjian lebih lanjut tentang sifat umum atau khusus karena menurut pendapat mereka akan mempromosikan pelaksanaan yang efektif dari MoU ini atau mengenai hal-hal khusus yang tercakup dalam MoU ini.
5. MoU ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan bersama dari para pihak melalui dan pertukaran catatan antara para pihak.

Perjanjian ini ditandatangani di Stockholm pada tanggal 13/10/1426H atau 15/11/2005.

2. Penarikan duta besar Arab Saudi dari Swedia Tahun 2015

Pada tahun 2014, pemerintah Swedia menerapkan kebijakan feminis sebagai tanggapan atas masih adanya diskriminasi dan subordinasi yang masih banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari atas perempuan dan anak-anak perempuan yang tak terhitung jumlahnya. Tujuan dari penerapan kebijakan ini

sendiri adalah agar Perempuan dan laki-laki dapat memiliki kekuatan yang sama untuk membentuk masyarakat dan kehidupan mereka sendiri (Handbook Sweden's feminist foreign policy, 2018).

Swedia dalam aksinya untuk menegakkan hak asasi manusia pada awal penerapan kebijakan luar negeri feminis ini sudah melakukan aksinya (Crouch, 2015). Pertama, pada tanggal 30 Oktober tahun 2014 Swedia mengakui Palestina sebagai sebuah negara dan ini menjadikan Swedia menjadi negara pertama anggota Uni Eropa di bagian barat eropa yang mengakui Palestina sebagai negara. Swedia berharap bahwa pengakuan yang dilakukanya ini dapat diikuti oleh negara lain (Beaumont, 2014).

“Today the government takes the decision to recognise the state of Palestine. It is an important step that confirms the Palestinians. We hope that this will show the way for others.”

Palestina dan negara-negara Arab sangat mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Swedia. Tetapi akibat dari apa yang dilakukan oleh Swedia ini berdampak pada hubungan Swedia dengan Israel. Israel sendiri memutuskan untuk menarik duta besarnya di Swedia sebagai bentuk protes dan juga kekecewaan Israel terhadap keputusan Swedia. Israel mengatakan bahwa Palestina hanya bisa menjadi negara dengan melalui negosiasi langsung antara Israel dan Palestina tanpa melalui saluran diplomatik lainnya (Crouch, 2015).

Kedua, Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom mengkritik apa yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Blogger Raif Badawi (Crouch, 2015).

Raif Badawi sendiri seorang blogger dan juga aktivis di Saudi yang mendapatkan hukuman 1000 cambukan dan 10 tahun penjara oleh pemerintah Arab Saudi setelah dituduh telah menghina Islam (Crouch, 2015).



Margot Wallström ✓

@margotwallstrom

Follow



Blogger Raif Badawi was flogged today in Saudi Arabia. This cruel attempt to silence modern forms of expression has to be stopped.

6:24 AM - 9 Jan 2015

Swedia sendiri seperti yang sudah dijelaskan di atas mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Atas adanya pengakuan ini, Arab Saudi pun mengapresiasi Swedia dengan memanggil Swedia untuk ikut berkumpul dalam pertemuan liga Arab yang diadakan pada bulan maret 2015 di kairo, mesir (Beaumont, 2014). Dalam pertemuan ini sendiri Swedia menjadi tamu kehormatan. Tetapi dalam pertemuan itu Swedia yang tadinya akan berpidato mengenai hak asasi manusia tidak diberikan tempat oleh Arab Saudi untuk berbicara. Hal ini dikarenakan kritik yang dilakukan oleh Swedia terhadap hak asasi manusia di Arab Saudi (Taylor, 2015).

Setelah berlangsungnya pertemuan ini, Arab Saudi akhirnya menarik duta besarnya yang berada di Swedia sebagai tindakan kekecewaan terhadap Swedia yang telah mengkritik hak asasi manusia di Arab Saudi (Taylor, 2015). Arab Saudi menganggap bahwa Swedia bukan hanya mengkritik mengenai hak asasi manusia

ataupun masalah internal Arab Saudi, tetapi menurutnya Swedia telah mengkritik seluruh konsep hukum syariah yang membentuk dasar dari seluruh sistem hukum Arab Saudi. Arab Saudi bangga dengan hukum Islamnya yang melindungi hak asasi manusianya dengan konsep syariah dan hal ini juga menjadikan Arab Saudi sebagai “suar cahaya” bagi umat Islam di seluruh dunia (Taylor, 2015).

C. Kesimpulan

Swedia dan Arab Saudi susah sejak lama menjalin hubungan diplomatik, dimulai pada tahun 1957 dan masing-masing negara baru memiliki wakil duta besarnya pada tahun 1989. Swedia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi ini memiliki hubungan dekat dengan Arab Saudi yang sangatlah bersebrangan dengan Swedia. Sudah banyak sekali kedua negara ini menjalankan kerjasama bisnis. Swedia sendiri sudah banyak membangun bisnisnya di Arab Saudi. beberapa perusahaan besar Swedia juga sudah mendirikan usahanya di Saudi seperti IKEA an H&M.

Tetapi di luar kerjasama bisnis ini Swedia dan Arab Saudi juga melakukan kerja sama dalam industri militer. Walaupun banyak sekali pro dan kontra terkait kerja sama ini tetapi tanda tangan nota kesepahaman sudah disepakati oleh ke dua negara pada tahun 2005. Yang menyebabkan pro dan kontra mengenai kerjasama ini sendiri adalah karena adanya perbedaan yang sangat mencolok antara Swedia dengan Arab Saudi. Sweda sangat menjunjung tinggi terkait hak asasi manusia sedangkan Arab Saudi masih dianggap negara yang memiliki sistem diktator. Apalagi pada tahun 2014 Swedia menerapkan kebijakan luar negeri feminis.

Pada saat Swedia menerapkan kebijakan ini, Swedia sangat gencar untuk menegakkan hak asasi manusia diberbagai negara. Yang paling mencolok dari tindakan Swedia sendiri adalah ketika Swedia mengakui Palestina sebagai sebuah negara serta sikap Swedia yang mengkritik Arab Saudi mengenai hak asasi manusia yang menyebabkan Arab Saudi menarik duta besarnya dari Swedia.

